LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
KELAS II
Triwulan Ke- II

TAHUN 2026

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
PASTI OK!
Reformasi Birokrasi
Zona Integrasi, Wilayah Bebas Korupsi,
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
YES!!!

Laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal kelas II

Disahkan Tanggal : 1 Juli 2026

Berlaku sejak tanggal : 1 April 2026 s/d 30 Juni 2026

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II,

JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H.

KATA PENGANTAR

Laporan Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II ini di susun sebagai bagian dari tugas untuk melaporkan proses pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II pada tahun 2026 sekaligus sebagai tolak ukur komitmen Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Laporan akhir ini juga sebagai bahan evaluasi bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

Demikian laporan akhir ini kami susun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Tungkal, 1 Juli 2026
Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II,

JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H.

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud dan Tujuan 2

1.3. Landasan Hukum 2

1.4. Rencana Kerja 3

1.4.1 Persiapan 3

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data 3

1.4.3 Metode Survei 4

BAB II METODOLOGI 5

2.1. Metodologi Penelitian 5

2.2. Populasi dan Sampel 5

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis 5

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control 5

2.5. Teknik Analisis Data 6

2.6. Tahapan Pelaksanaan 6

BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI 9

3.1. Profil Responden 9

3.1.1 Tingkat pendidikan responden 9

3.1.2 Pekerjaan responden 9

3.2 Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator 10

3.2.1 Indeks pada indikator manipulasi peraturan 10

3.2.2 Indeks pada penyalahgunaan jabatan 10

3.2.3 Indeks pada indikator menjual pengaruh 11

3.2.4 Indeks pada indikator transaksi biaya 11

3.2.5 Indeks pada indikator biaya tambahan 12

3.2.6 Indeks pada indikator hadiah 12

3.2.7 Indeks pada indikator transparansi biaya. 13
3.2.8 Indeks pada indikator percaloan ..... .13
3.2.9 Indeks pada indikator perbuatan curang 14
3.2.10 Indeks pada indikator transaksi rahasia ..... .14
3.3 Indeks persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal 15
3.4 Persepsi responden terhadap Kualitas Pelayanan..... 16

BAB IV PENUTUP 17
4.1. Kesimpulan 17
4.2. Rekomendasi 17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Model alur penyusuna survey IPK Menuju ZI 7
Tabel 2. Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi 7
Tabel 3.Nilai Persepsi 8
Tabel 4. Tingkat pendidikan responden 9
Tabel 5. Jenis pekerjaan responden 10
Tabel 6. Indeks pada indikator manipulasi peraturan 10
Tabel 7. Indeks pada penyalahgunaan jabatan 11
Tabel 8. Indeks Menjual Pengaruh 11
Tabel 9. Indeks pada Transaksi Biaya 11
Tabel 10. Indeks pada Biaya Tambahan 12
Tabel 11. Indeks pada Hadiah 12
Tabel 12. Indeks pada indikator transparansi biaya 13
Tabel 13. Tabel indeks pada Percaloan 13
Tabel 14. Indeks pada indikator Perbuatan Curang 14
Tabel 15. Indeks pada indikator Transaksi rahasia 14
Tabel 16. Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal 15
Tabel 17. Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal 15
Tabel 18. Masukan dan pandangan pengguna layanan 16

LAMPIRAN

1. Kuesioner
2. Data Umum Responden
3. Hasil Perhitungan IPK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak Tahun 2017, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II telah memperoleh Penilaian Akreditasi dengan nilai ***A Excellent,*** Prestasi tersebut membuktikan bahwa dengan adanya kerja keras dan komitmen yang kuat sehingga Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II mampu mempertahankannya. Oleh karena itu sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Instansi Pemerintah yang bersih dan melayani. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II merupakan unit kerja yang memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis para pencari keadilan serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II yang akan di tetapkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi menjadi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu memperoleh masukan dari masyarakat dalam memperoleh pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani semua para pencari keadilan.

1.3. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme;
b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;

f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;

g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

  Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan

  a. Kuesioner;
  b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar;
  c. Kelengkapan peralatan.
  d. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan
  e. DataLokasi dan Waktu Pengumpulan Data;

- Penyusunan Jadwal

  Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3 Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun)

BAB II
METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mengambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II. Unit analisis survei ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner dengan wawancara tatap

mukadan melalui Website Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Hakim pengawas. Hakim Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI.**

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrument yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi

korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini.

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas

Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3

Nilai Persepsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Baik
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Baik
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Sangat Baik

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SLTA sebesar 32%.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

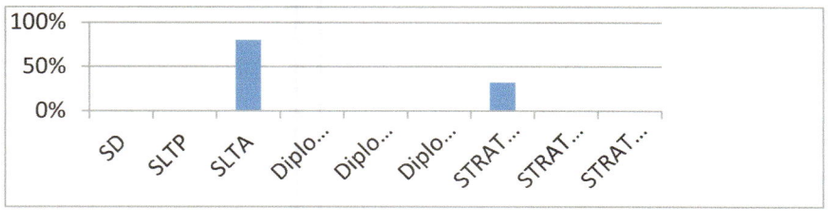

3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 84% responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II memiliki pekerjaan sebagai Pekerjaan Lainnya, PNS 10%, 0% TNI , 3% Polri, dan 16% Swasta, 0% Wirausaha dan 0% Tenaga Kontrak

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

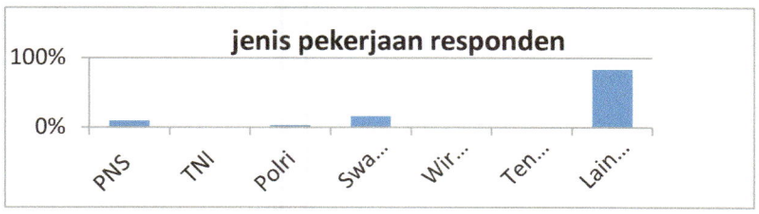

3.2. Indeks persepsi korupsi perindikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator

Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan manipulasi peraturan.

Tabel 6.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

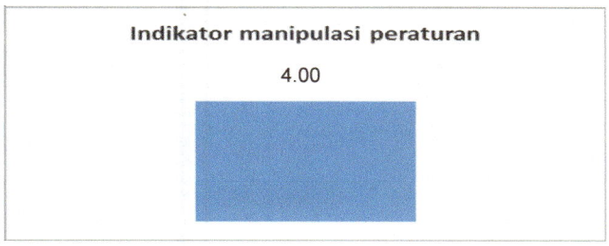

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukan hasil pada index 3,844. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan penyalahgunaan jabatan.

Tabel 7.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

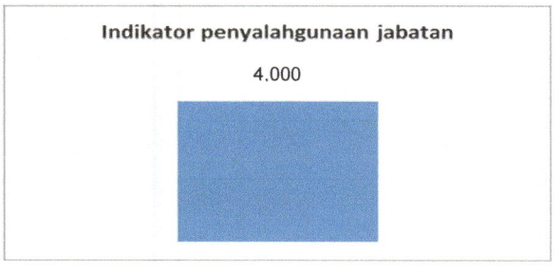

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,833. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan menjual pengaruh.

Tabel 8.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

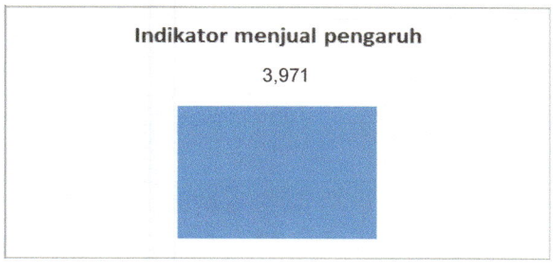

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,938. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dalam tindakan Transaksi Biaya.

Tabel 9.

Indeks pada indikator transaksi biaya

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,885. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan Biaya Tambahan.

Tabel 10.

Tabel indeks pada indikator Biaya Tambahan

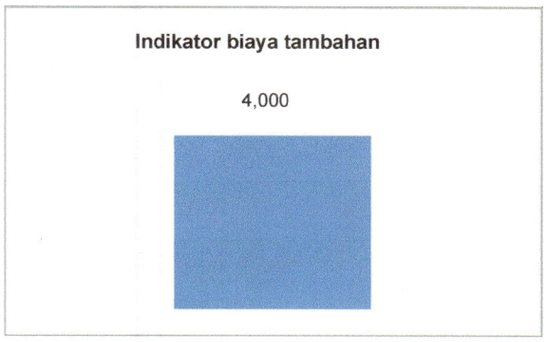

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4,000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari Hadiah.

Tabel 11.

Indeks pada indikator Hadiah

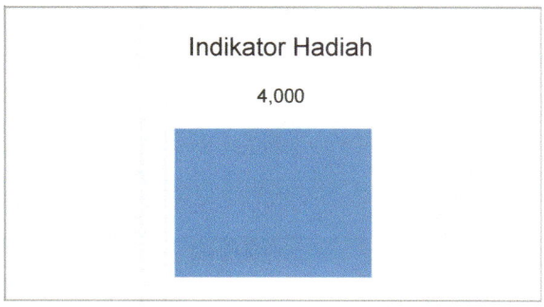

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indicator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,958. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari Indikator Transparansi Biaya.

Tabel 12.

Indeks pada indicator Transparansi Biaya

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dalam hal Percaloan.

Tabel 13.

Indeks pada indikator Percaloan

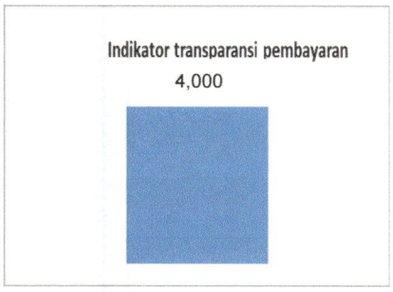

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan Perbuatan Curang.

Tabel 14.

Indeks pada indicator Perbuatan Curang

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari Transaksi Rahasia ;

Tabel 15.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II sebesar 4,00

Tabel 16.

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

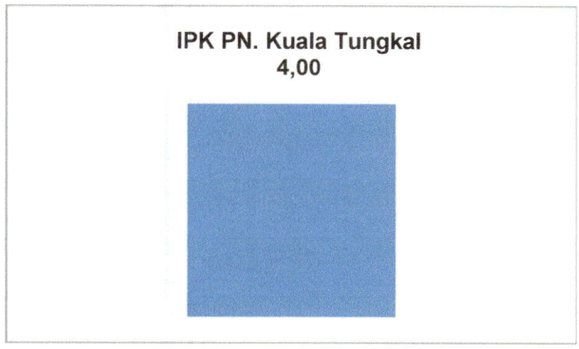

Indeks 4,00 tersebut jika dkonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 100,00

Tabel 17.

Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Baik
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Baik
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Sangat Baik

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Adapun masukan dari responden diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 18.Masukan Dan Pandangan Pengguna Layanan
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

No	Masukan Dan Pandangan Pengguna Layanan
1	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah baik dalam memberikan pelayanan yang bersih
2	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal melakukan tugas dengan professional dan akuntabel
3	Pelayanan yang diberikan cepat, baik dan memuaskan

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II diperoleh informasi bahwa **Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,99 dengan nilai Interval 99,79%** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI.** Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,000;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,971;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,943;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,000;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,000;
7. Indikator Transparansi Biaya , mendapat indeks 4,000;
8. Indikator Percaloan mendapat indeks 4,000;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,000;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000;

Secara Keseluruhan Indikator masing – masing memiliki indeks 4,000;

4.2. Rekomendasi

1. Merujuk pada hasil indeks persepsi triwulan II tahun 2026 pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II Tahun 2026 tersebut diatas, menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki indeks 4,000. Dengan demikian kedepannya agar perlu dipertahankan kinerjanya oleh semua pegawai di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, mulai dari Pimpinan, Hakim, Staf, PPPK dan pada akhirnya juga bermanfaat untuk mengambil tindakan dan kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
Tim sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH)

Jl. Prof. DR. Sri Soedewi MS, SH.,
Kel. Pembengis, Kec. Bram Itam,
Tanjung Jabung Barat, Jambi 36514

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT, SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEY HARIAN

Nomor : 1229 /KPN.W5-U3/UND.HM2.1/VI/2026 Kuala Tungkal, 29 Juni 2026

Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Monev IKM dan IPK Minggu Ke 5 Triwulan II Tahun 2026

Yth. 1. Hakim
2. Panitera
3. Sekretaris
4. Pejabat Struktural
5. Pejabat Fungsioanl
6. Staff
7. Pppk;

Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Di_
Kuala Tungkal

Dengan hormat,

Diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam acara Monitoring dan Evaluasi Survey IKM dan IPK Minggu Ke 5 Triwulan II tahun 2026 oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal	: Senin, 29 Juni 2026
Jam	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Cakra;

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara/i tepat pada waktunya. Atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Joni Mauluddin Saputra, S.H.,M.H.

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

Tim sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH)

Jl. Prof. DR. Sri Soedewi MS, SH.,
Kel. Pembengis, Kec. Bram Itam,
Tanjung Jabung Barat, Jambi 36514

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT, SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEY HARIAN

NOTULA

Dasar : - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230 / DJU / SK / HM.02.3 / 4 / 2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (LENTERA), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER), dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum;

Hari : Senin
Tanggal : 29 Juni 2026
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Acara : Monitoring dan Evaluasi IKM dan IPK minggu ke-5 Triwulan II Tahun 2026

Peserta Rapat : Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Staff.
Jalannya Rapat :

Pada hari ini Senin, tanggal 29 Juni 2026 pukul 09.00 Wib, Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Telah Melakukan Monev Hasil Survey IKM dan IPK Minggu Ke-5 Triwulan II Tahun 2026 kepada Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Penyampaian Ketua:

Dengan Hasil Survey IKM dan IPK Triwulan II Tahun 2026 yang telah didapat dan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan demikian kedepannya agar kinerja oleh semua pegawai di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, mulai dari staf pimpinan, Hakim, agar selalu ditingkatkan dan pada akhirnya juga bermanfaat untuk mengambil tindakan dan kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Demikian notulen ini dibuat dan ditandatangani oleh notulen rapat, dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Kuala Tungkal, 29 Juni 2026

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Notulen Rapat,
JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H.,M.H.	**SEPTIA KHOIRUNNISA A.Md.T.**

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
Tim sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH)

Jl. Prof. DR. Sri Soedewi MS, SH., Kel. Pembengis, Kec. Bram Itam,
Tanjung Jabung Barat, Jambi 36514

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT, SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEY HARIAN

MONITORING DAN EVALUASI SURVEY IKM DAN IPK MINGGU KE 5 TRIWULAN II TAHUN 2026

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

No	Kegiatan	Sasaran	Penanggung Jawab	Pelaksana	Masalah	Tindak Lanjut	Indikator Keberhasilan
1	Monev IKM dan IPK Minggu ke 5 Triwulan II Tahun 2026	Seluruh Pegawai	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Tim Survey	**Hasil Nilai Survey IKM Triwulan II Tahun 2026** secara keseluruhan adalah **99,68% dengan nilai rata-rata unsur 4,000** artinya nilai rata-rata dari seluruh unsur penilaian berada pada **kategori A** dengan mutu kinerja **Sangat Baik;** **3 Unsur terendah IKM yaitu:** • Unsur **Waktu Pelayanan** dengan nilai **3,943;** • Unsur **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** dengan Niai **3.971;** • Unsur **Prosedur** dengan nilai **3,971;** **Hasil Nilai Survey IPK Triwulan II Tahun 2026 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,99 dengan nilai interval 99,79%** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**	- Ketua Pengadilan Negeri mengingatkan agar seluruh petugas PTSP agar melakukan pendampingan dan terus menerus memberikan informasi tentang petunjuk penggunaan aplikasi Sisuper; - Kepada Hakim Pengawas PTSP agar melakukan briefing dan evaluasi terhadap petugas PTSP dalam penggunaan aplikasi Sisuper;	Apabila nilai survey IKM dan IKM secara terus menerus mengalami peningkatan dan kinerja pelayanan yang meningkat

					2 Unsur terendah Indeks Persepsi Korupsi terdapat pada: indikator **Transaksi Biaya** dengan indeks 3,943 dan indikator **Menjual Pengaruh** dengan indeks 3,971;		

Kesimpulan : Bahwa laporan survey IKM dan IPK Triwulan II tahun 2026 yang telah diperoleh secara umum menunjukan hasil yang sangat memuaskan

Rekomendasi : Dengan demikian kedepannya harus selalu ditingkatkan kinerjanya dan sebagai bahan dalam melakukan evaluasi kinerja oleh semua pegawai di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, mulai dari Pimpinan, Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf & PPPK pada akhirnya juga bermanfaat untuk mengambil tindakan dan kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Kuala Tungkal, 29 Juni 2026
Ketua Pengadilan Negeri,

JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H.,M.H.

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

Tim sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH)

Jl. Prof. DR. Sri Soedewi MS, SH.,
Kel. Pembengis, Kec. Bram Itam,
Tanjung Jabung Barat, Jambi 36514

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT, SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEY HARIAN

DAFTAR HADIR MONEV SURVEY IKM DAN IPK MINGGU KE-5

TRIWULAN II TAHUN 2026

Hari/Tanggal: Senin/ 29 Juni 2026

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H.,M.H.	KETUA	
2.	SUKADI, S.H.,M.H	PANITERA	
3	JULIADI, S,Kom	SEKRETARIS	
4	MAIRINO SUSTRA, S.Kom	KASUBBAG PTIP	
5	FEBRI DWI SAPUTRA, S.H	PANMUD PERDATA	
6	YULLI ROPIKA HASNITA, S.H	PANMUD PIDANA	
7	MUTMAINAH, S.H	PANMUD HUKUM	
8	PURNAMASARI, S.H	KASUBBAG KEPEGAWAIAN	
9	YURI ANDRIYANSYAH, S.H	PANITERA PENGGANTI	
10	FITRIYANTI, S.H	JURUSITA	
11	NORA, S.H	KASUBBAG UMUM & KEU	
12	LISTIONO RAHMADI, S.T	PRANATA KOMPUTER	
13	MOKOARI SIMAMORA, S.H.,M.H	HAKIM	
14.	SANDY ALETTA SINAGA, S.H.,M.H	HAKIM	
15	DWI ASTUTI NURJANAH, S.H.,M.H	HAKIM	
16	MELVA CHRISTIEN MANURUNG, S.H	HAKIM	
17	DIPA RIVALDI, S.H	HAKIM	
18	FALIH FAKHRI FADILLAH, S.H	HAKIM	
19	RIZKY MUTIARA SARI, S.H	HAKIM	
20	TARSICIUS B. TELAUMBANUA, S.H	HAKIM	
21	NOVALIA MARBUN, S.H	ANALIS PERKARA PERADILAN	
22	LUTHFIAH FARADILLA, A.Md.A.B.	ARSIPARIS PELAKSANA	
23	ABDUL HALIM	JURUSITA	
24	SUPRIYADI	JURUSITA PENGGANTI	
25	ALMIRA WAROSA, A.Md.A.B.	PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

Tim sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH)

Jl. Prof. DR. Sri Soedewi MS, SH.,
Kel. Pembengis, Kec. Bram Itam,
Tanjung Jabung Barat, Jambi 36514

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT, SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEY HARIAN

26	DAVID SONLY TAMBUNAN, S.T.	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	
27	BENNY AGUSTIAN, A.Md.	DOKUMENTALIS HUKUM	
28	LELLY YESSI KARTINA M, A.Md.A.B.	DOKUMENTALIS HUKUM	
29	SEPTIA KHOIRUNNISA, A.Md.T.	DOKUMENTALIS HUKUM	
30	KHALISHAH AMALIA A, A.Md.A.B.	DOKUMENTALIS HUKUM	
31	AHMAD PADILLAH,S.H.	PPPK	
32	NANDA DWI NOVANSYAH,S.H.	PPPK	
33	HAMRONI	PPPK	
34	KIKI AMELIA	PPPK	
35	SUKARSIH PRANSISKA SARI	PPPK	
36	RINI MELATI	PPPK	
37	SOPIYAN	PPPK	
38	SUHARTONO	PPPK	
39	SYAHRULLAH	PPPK	
40	HENGKI SAPUTRA	PPPK	
41	SUGIYONO	PPPK	

PETUGAS DAFTAR HADIR

Lelly Yessi Kartina, A.Md. A.B.
NIP. 19990524 202506 2 014

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

Tim sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH)

Jl. Prof. DR. Sri Soedewi MS, SH.,
Kel. Pembengis, Kec. Bram Itam,
Tanjung Jabung Barat, Jambi 36514

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT, SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEY HARIAN

DOKUMENTASI RAPAT MONEV IKM DAN IPK
MINGGU KE – 5 TRIWULAN II 2026